

## INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

### PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Iis Nur'aisyah<sup>\*</sup> Leonita Silvyna Dora<sup>\*\*</sup> Kholishoh<sup>\*\*\*</sup> Abdul Aziz<sup>\*\*\*\*</sup>

Email: [iisnuraisyah09@gmail.com](mailto:iisnuraisyah09@gmail.com)<sup>\*</sup> [leonitasilvyna99@gmail.com](mailto:leonitasilvyna99@gmail.com)<sup>\*\*</sup>  
[kholishoh526@gmail.com](mailto:kholishoh526@gmail.com)<sup>\*\*\*</sup> [abdul\\_aziz@syekhnurjati.ac.id](mailto:abdul_aziz@syekhnurjati.ac.id)<sup>\*\*\*\*</sup>

Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

#### Artikel info:

Received: 19  
August 2020  
Accepted: 12  
September 2020  
Available online:  
December 2020

#### ABSTRAC

The object of research is the Islamic People's Financing Bank in Indonesia, where the source of the data is obtained from the Financial Services Authority (OJK) website. The type of data used is secondary data in the form of evidence, notes, or historical reports that have been neatly arranged in the archives using literary, documentary, discussion, and subjective-intuitive study techniques. Based on the results of the study showed that the BPRS has implemented good management between the ratio of deposits to financing, especially intended for MSMEs. In this MSMEs financing, MSMEs is trusted by the public by reflecting the amount of financing which has increased every year. This can also be seen with the increasing number of MSMEs each year in Indonesia.

**Keywords:** Role of Islamic Bank; Sharia Financing Bank; UMKM.

#### ABSTRAK

Objek penelitian ini yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang sumber datanya diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip dengan menggunakan teknik studi literatur, dokumenter, diskusi, dan intuitif-subjektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Peran Bank Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; UMKM.

## I. PENDAHULUAN

Uang merupakan alat tukar yang sah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Keberadaan uang dan berbagai permasalahannya memerlukan suatu lembaga khusus untuk menangani dan menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kondisi suatu perekonomian, sehingga dibentuklah suatu lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang menunjang perekonomian suatu Negara. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pasca krisis moneter (1998-1999), ekonomi Islam lebih tepatnya perbankan syariah menjadi sistem alternatif di Indonesia karena terbukti bahwa krisis tersebut tidak berpengaruh kepada bank syariah. Dengan adanya bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup> Pada dasarnya BUS dan BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Dapat dilihat dari tahun ke tahun perkembangan industri perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari jumlah bank, jumlah kantor, dan jumlah tenaga kerja semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK yang menunjukkan hingga Desember 2019, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 164 dengan jumlah kantor sebanyak 617 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.620 orang.<sup>3</sup>

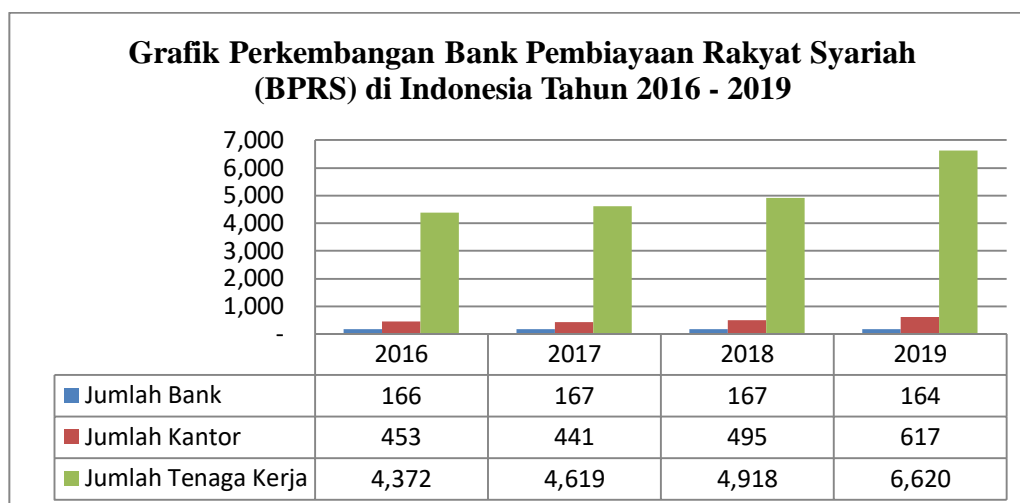
---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

<sup>2</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perkembangan Industri Perbankan," n.d., <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020.aspx>.

**Table 1**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil bumi terutama masyarakat di pedesaan. Hasil bumi tidak langsung dijual secara mentah melainkan diolah terlebih dahulu untuk menambah nilai ekonomis yang kemudian diperjual-belikan melalui UMKM. Selanjutnya, UMKM diharapkan menjadi sektor usaha yang mampu memberikan terobosan dalam hal inovasi produk juga strategi pemasarannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 terdapat 3.385.851 usaha mikro dan 283.022 usaha kecil dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 57,84%.<sup>4</sup>

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di lain sisi, pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancar (*non performing financing*). UMKM terbilang penting kedudukannya terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pada kenyataannya akses terhadap permodalan masih belum maksimal. Peran lembaga pembiayaan syariah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia tentu ada yang berhasil ataupun tidak. Dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan formal dinilai terbatas bagi kalangan UMKM. Sehingga kalangan UMKM lebih berminat terhadap lembaga-lembaga informal dikarenakan sifatnya yang fleksibel seperti syarat pinjaman dan jumlah pinjaman tidak begitu ketat serta prosesnya yang cepat. Namun, perlu dicatat bahwa hal tersebut justru akan membawa UMKM ke ranah yang mungkin memberatkan untuk keberlangsungan UMKM tersebut.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah UMKM," n.d., <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/11/22/1004/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi-2013-2015.html>.

Dengan melihat keadaan UMKM tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan dari pihak lain terutama dalam segi keuangan, manajemen, teknologi, dan lainnya agar terciptanya UMKM yang kokoh, salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai perantaranya.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana peran Perbankan Syariah dan BPRS?; Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia?; Bagaimana peran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dalam pengembangan UMKM di Indonesia?. Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui peran Perbankan Syariah dan BPRS; untuk mengetahui perkembangan UMKM di Indonesia; untuk mengetahui peran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di bidang ekonomi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah.<sup>5</sup> Sedangkan, pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini.<sup>6</sup>

Adapun objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang sumber datanya diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip dengan menggunakan teknik studi literatur, dokumenter, diskusi, dan intuitif-subjektif. Artinya, penulis terlibat atas permasalahan yang sedang dibahas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Perbankan Syariah dan BPRS**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian Negara Indonesia. Lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan bagi masyarakat yang kekurangan dana maupun yang kelebihan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional

---

<sup>5</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

<sup>6</sup> Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

berkembang cukup pesat baik dari segi aset maupun kegiatan usahanya. Bank syariah telah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan, pasar modal syariah maupun obligasi dengan.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>7</sup> Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dikatakan bahwa pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup> BPRS berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada di pedesaan.

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.<sup>9</sup> Peran strategis lembaga keuangan berbasis syariah di era digital dapat memberikan solusi terkait masalah keuangan, salah satunya adalah pilar dalam membangun ekonomi sosial dari sisi mikro dan makro. Dari sisi mikro dapat dilihat dari pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>10</sup>

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah yang berpedoman pada syariat Islam wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam pengimplementasian moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:<sup>11</sup>

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual-beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* ataupun dalam bentuk IMB.
5. Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*.

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

<sup>9</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).

<sup>10</sup> Ivan Rahmat Santoso, Syarwani Canon, and Abd. Rahman Pakaya, *The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era* (2019).

<sup>11</sup> Ahmad Fauzi, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019).

## 6. Pembiayaan multi jasa.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan antara bank syariah dengan masyarakat bukan sebagai kreditur dan debitur melainkan menjadi hubungan kemitraan. Hal tersebut juga menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU No. 21 Tahun 2008, antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (a) Simpanan berupa tabungan dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, (b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *ishtishna*, (c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, (d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (e) Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK), dan Unit Usaha Syariah (UUS).
5. Menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

### **B. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia**

Usaha mikro merupakan bisnis yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa usaha mikro adalah bisnis produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup> Kriteria tersebut yakni memiliki modal maksimal 50 juta dan omset mencapai 300 juta. Pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara mempunyai tujuan strategis, diantaranya dikaitkan dengan standar kuantitatif tertentu serta seberapa jauh dapat

---

<sup>12</sup> Tri Mulato and Nursyamsu, "The Strengthening Role of Islamic Financial Institutions For The Real Sector of SMEs," in *AICIEB*, 2019.

dimasukkan ke dalam jenis-jenis usaha atau bisnis. Tujuan pengelompokan usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.
2. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.
4. Untuk mempertimbangkan badan tertentu berkaitan dengan kinerja perusahaan.

UMKM juga berperan secara krusial di negara lain yakni bahwa sektor UMKM di Pakistan merupakan sektor terbesar terhadap perekonomian negara yang selanjutnya mampu memberikan kontribusi melalui penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, mengurangi angka pengangguran, dan menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, UMKM, pemerintah yang memegang wewenang dan perbankan perlu untuk memastikan bahwa UMKM mampu untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan skala usahanya yang mana kemudian akan memberikan peran penting terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.<sup>13</sup>

Madanchian et al (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peran UMKM di Malaysia telah mendapatkan perhatian akibat dari kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kontribusi UMKM pada perekonomian. Sumber daya dan keterampilan yang baik perlu ditingkatkan dan dilatih untuk membuat performa UMKM di Malaysia menjadi lebih baik yang kemudian akan membuatnya kompetitif di pasar negara maju maupun negara berkembang.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak secara langsung berperan dalam pengembangan UMKM. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pemberian kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Kebijakan tersebut antara lain, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang pemberian kredit usaha kecil, PBI NO. 6/25/PBI/2004 sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/21/ PBI/2010 perihal rencana bisnis bank umum dalam penyaluran kredit UMKM, PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM berperan sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tetapi juga menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) juga paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>14</sup> Peran UMKM di Indonesia dipercaya sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'i, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM," *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017).

<sup>14</sup> Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

negara. Kehadiran UMKM semakin dirasakan dampaknya selama krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 jika dibandingkan dengan industri-industri besar.

Hidayat Keskin (2010) dalam jurnal yang ditulis oleh Achmad Rifa'i, menyatakan bahwa peran UMKM memiliki peran penting dalam hal menumbuhkan perekonomian secara bersama-sama di negara maju dan negara berkembang meskipun terdapat perbedaan dalam hal definisi UMKM di antara berbagai macam organisasi dan negara. Saat ini UMKM telah mampu mengambil peran dalam mengembangkan perekonomian menjadi lebih baik melalui penggunaan modal kerja yang sedikit, tetapi menyerap banyak tenaga kerja dan tidak memiliki struktur manajemen yang rumit sehingga menurunkan biaya produksi. Singkatnya, konsep *small is beautiful* menjadi penting pada situasi ekonomi sekarang ini dibandingkan industri besar.<sup>15</sup>

### C. Peran Pembiayaan BPRS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia

Dari segi pembiayaan, perbankan syariah lebih bergantung pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga hal ini membutuhkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kemudian, tujuan pemerintah mendirikan bank syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif perbankan berbasis syariah bagi masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme pada sektor riil melalui kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan mudharabah yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Menurut Naja, pembiayaan pada bank syariah secara garis besar dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>17</sup>

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan kontribusi secara sektoral, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian dan perdagangan menjadi tulang punggung bagi UMKM dimana kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya kontribusi tersebut cukup menjadi alasan karena jika dilihat dari karakteristik dan

---

<sup>15</sup> Rifa'i, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM."

<sup>16</sup> Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011).

<sup>17</sup> Naja Daeng, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).



jumlah UMKM yang ada di Indonesia, kedua sektor tersebut sangat dominan dalam jumlah UMKM-nya. Sektor ekonomi lainnya yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor industri. Berkembangnya sektor industri dipicu oleh berkembangnya sektor pariwisata sehingga industri kecil dan menengah ikut berkembang. Permintaan produk-produk kerajinan UMKM meningkat di pasaran baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.<sup>18</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Untuk memperoleh pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, masyarakat tentunya akan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank baik persyaratan yang harus dipenuhi maupun ketentuan pembiayaan yang kemudian disepakati bersama. Tentunya, dalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal. Maka, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM. Tetapi, perlu diingat bahwa dalam pemberian modal tersebut UMKM harus mempunyai jaminan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Namun, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan modal usahanya sehingga bank tidak berkenan untuk memberikan pembiayaan tersebut jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut.

Kemudian dalam pemberian pembiayaan akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak bank yaitu dengan dilakukannya analisis 5C. *Pertama*, Karakter (*character*). Yaitu sifat atau karakter dari individu dalam hal ini adalah debitur. *Kedua*, Kapasitas (*capacity*). Yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. *Ketiga*, Modal (*capital*). Yaitu kondisi keuangan pelanggan (pendapatan bersih). *Keempat*, Kondisi (*condition*). Yaitu kondisi ekonomi eksternal yang mengendalikan usaha. *Kelima*, Jaminan (*collateral*). Yaitu menjanjikan kekayaan untuk keamanan.<sup>19</sup>

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum sepenuhnya maksimal dalam mengembangkan UMKM. Pihak bank hanya dapat membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan serta tidak membantu mengembangkan UMKM tersebut misalnya dengan memberi pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu bersaing dengan UMKM lain serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Tetapi, seringkali BPRS juga melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM kedalam pameran, memfasilitasi keberadaan tempat usaha, dan memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha. Namun, itikad pembinaan yang dilakukan oleh BPRS seringkali mendapat penolakan dari pihak UMKM dengan alasan waktu yang terbatas dan merepotkan. Pembinaan ini terutama terjadi dalam hal

---

<sup>18</sup> Kementerian Perdagangan, "Permintaan Produk Kerajinan UMKM Meningkat," n.d., [www.bppp.kemendag.go.id](http://www.bppp.kemendag.go.id) t.thn.

<sup>19</sup> Izzati Choirini Mardhotillah, "5C Factor Analysis Aspects of The Designation of Lending of Working Capital in PD. BPR Bank Regional Lamongan," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2019).

keuangan, karena UMKM lebih menyukai pembukuan yang dilakukan secara mandiri walaupun seringkali pembukuan tersebut terbengkalai.

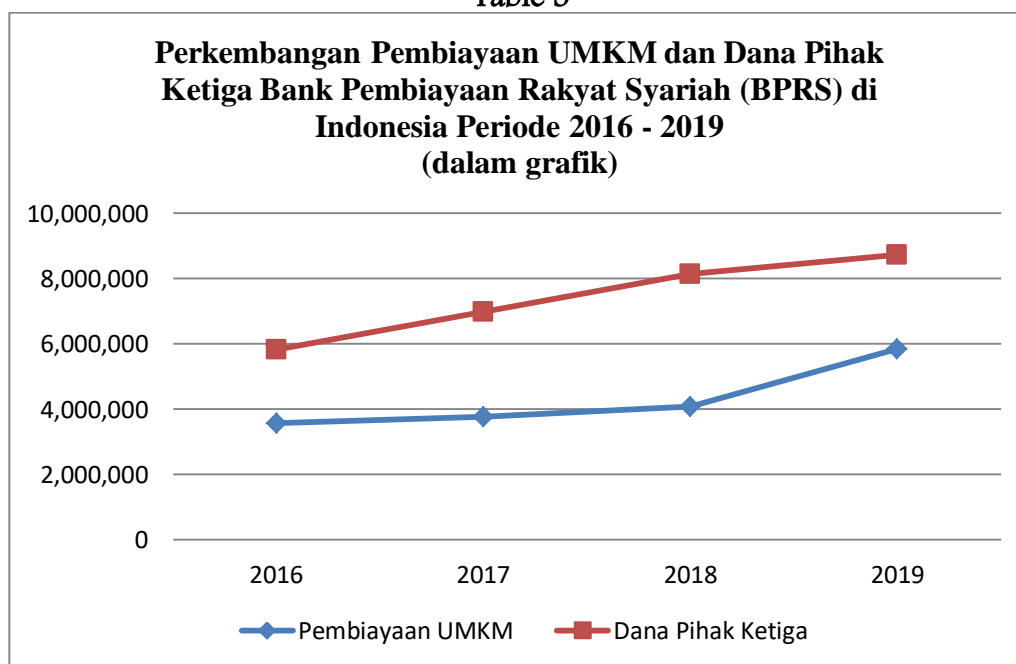
Pembiayaan pada dasarnya diberikan dengan konsep kepercayaan. Memberikan pembiayaan sama halnya dengan memberikan kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan dalam hal ini yaitu kepada UMKM sesuai dengan ketentuan waktu dan syarat serta perjanjian yang disepakati bersama. Penyaluran pembiayaan menjadi salah satu prioritas bagi bank dalam pengalokasian dananya. Hal ini disebabkan sumber dana bank diperoleh dari dana masyarakat sehingga bank harus menyalurkan kembali dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

**Table 2**  
**Perkembangan Pembiayaan UMKM dan Dana Pihak Ketiga**  
**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2016 – 2019**

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan UMKM	3.570.606	3.767.877	4.086.485	5.841.290
Dana Pihak Ketiga	5.823.964	6.987.280	8.134.938	8.731.890

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

**Table 3**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

Peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat ditujukan untuk menjaga operasional dan keuangan di BPRS. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK yang dipercaya sebagai penggerak keberlangsung bisnis bank syariah. Berdasarkan data dan grafik diatas terlihat bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan UMKM juga harus diikuti BPRS untuk menjangkau UMKM dalam mengakses produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS. Semakin besar jumlah DPK, maka dapat dikatakan bahwa adanya potensi pasar pada BPRS dan semakin besar kemampuan BPRS dalam manajemen operasionalnya serta berinovasi dalam produknya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari segi layanan dinilai sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM yang ditinjau dari pelaksanaan system bagi hasil (*profit sharing*) serta adanya pendampingan usaha. Selain itu, untuk memberikan kepercayaan lebih terhadap BPRS, UMKM membutuhkan dukungan seperti jaminan profitabilitas dan rentabilitas dari sektor UMKM itu sendiri serta dukungan berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

**Table 4**  
**Pembiayaan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS) di Indonesia Berdasarkan Kualitas**  
**Pembayaran Periode 2016 – 2019**

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Lancar	6.087.260	7.012.068	8.239.483	9.242.948
Kurang Lancar	109.241	158.628	147.712	141.161
Diragukan	100.645	123.194	146.322	124.271
Macet	365.409	470.061	550.949	434.940

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia diolah (www.ojk.go.id t.thn.)

Berdasarkan data tersebut, pembiayaan yang dilakukan BPRS pada sektor lancar terlihat pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan tersebut diikuti juga oleh sektor non lancar yang dari tahun ke tahunnya ikut meningkat juga. Tetapi, proporsi terhadap sektor lancar dikatakan sangat jauh sehingga kualitas pembiayaan BPRS termasuk dalam kategori *well prudent*.

BPRS perlu mengupayakan dengan cara membaca aktif dan mengkaji pasar serta tingkat persaingan yang dihadapi oleh UMKM. Pengawasan terhadap UMKM juga perlu dilakukan agar modal yang diberikan kepada UMKM dipastikan benar-benar digunakan secara optimal dalam bisnis sektor riil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selama adanya perjanjian yang masih berlaku, BPRS perlu terus untuk memantau bisnis yang dilakukan UMKM sampai masa kontrak habis dan menerima bagi hasil.

#### IV. KESIMPULAN

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara keseluruhan menjadi lembaga intermediasi keuangan dan juga hadir sebagai penunjang bagi masyarakat pelaku usaha UMKM. Perkembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Usaha mikro merupakan bisnis yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa usaha mikro adalah bisnis produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria tersebut yakni memiliki modal maksimal 50 juta dan omset mencapai 300 juta. Pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha disuatu negara mempunyai tujuan strategis, diantaranya dikaitkan dengan standar kuantitatif tertentu serta seberapa jauh dapat dimasukkan ke dalam jenis-jenis usaha atau bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan UMKM juga harus diikuti BPRS untuk menjangkau UMKM dalam mengakses produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS. Semakin besar jumlah DPK, maka dapat dikatakan bahwa adanya potensi pasar pada BPRS dan semakin besar kemampuan BPRS dalam manajemen operasionalnya serta berinovasi dalam produknya.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah UMKM," n.d.  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/11/22/1004/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi-2013-2015.html>.
- Daeng, Naja. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Fauzi, Ahmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Husaeni, Uus Ahmad. "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di

- Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 1 (2017).
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Isretno, Evita. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Juliyansyah, Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kementrian Perdagangan. "Permintaan Produk Kerajinan UMKM Meningkat," n.d. [www.bppp.kemendag.go.id](http://www.bppp.kemendag.go.id) t.thn.
- Mardhotillah, Izzati Choirini. "5C Factor Analysis Aspects of The Designation of Lending of Working Capital in PD. BPR Bank Regional Lamongan." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2019).
- Mulato, Tri, and Nursyamsu. "The Strengthening Role of Islamic Financial Institutions For The Real Sector of SMEs." In *AICIEB*, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Perkembangan Industri Perbankan," n.d. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020.aspx>.
- Rifa'i, Ahmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM." *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017).
- Santoso, Ivan Rahmat, Syarwani Canon, and Abd. Rahman Pakaya. *The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era* (2019).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Tambunan, Tulus. *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.